

PENGUATAN SISTIM AUDIT SYARIAH (L.1) DI TIGA BMT DI KECAMATAN BANGUNTAPAN-BANTUL-D.I. YOGYAKARTA

STRENGTHENING THE AUDIT SHARIAH SYSTEM (1ST LEVEL) IN THE THREE BMTs AT BANGUNTAPAN SUB-DISTRICT BANTUL-D.I. YOGYAKARTA

¹⁾Yuli Utami,* ²⁾ Ayif Fathurrahman

^{1,2)}Program Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul-D.I. Yogyakarta

*Email: yuliutami@umy.ac.id

ABSTRAK

Sasaran pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat produktif secara ekonomi di perumahan-perumahan di kecamatan Banguntapan yang baru saja mendirikan BMT. Tujuan program adalah untuk mengembangkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan literasi tinggi terhadap transaksi syar'i; dan untuk menganalisa operasional kegiatan serta efektivitas system control internal BMT mereka telah sesuai dengan kehendak syar'i (Shariah Compliance). Mitra dalam program ini adalah BMT yang baru saja berdiri dengan basis masjid perumahan, yaitu BMT Sakinah, BMT Al-Anbiya dan BMT Al-Huda. Permasalahan yang dihadapi ketiga mitra tersebut adalah: 1) Minimnya kompetensi dan manajemen dalam mengelola BMT, 2) Tidak memiliki legalitas, 3) Minimnya literasi keuangan syariah, sehingga anggota BMT masih tidak memahami fungsi BMT. Dengan kondisi seperti tersebut diatas, maka program-program yang kami usulkan adalah: 1) memperkenalkan system audit keuangan syariah BMT level pertama, 2) Pemantapan pemahaman dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi untuk BMT, selama lebih kurang delapan bulan. Program ini diharapkan mampu memfasilitasi perkembangan usaha mitra-mitra program pengabdian masyarakat untuk kemudian mampu memberikan multiplier effect bagi BMT-BMT berbasis masjid perumahan lain yang baru berdiri.

Kata Kunci : BMT Masjid Perumahan, Banguntapan, Audit Keuangan Syariah

ABSTRACT

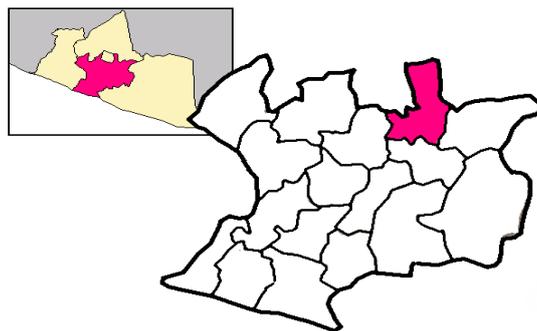
The target of community service is economically productive society in housing estates in the Banguntapan sub-district which has just established BMT. The aim of the program is to develop an economically independent community with high literacy on shar'i transactions; and to analyze the operational activities and effectiveness of their BMT internal control system in accordance with the wishes of the Shariah (Shariah Compliance). Partners in this program are the newly established BMT on the basis of a residential mosque, namely BMT Sakinah, BMT Al-Anbiya and BMT Al-Huda. The problems faced by the three partners are: 1) Lack of competence and management in managing BMT, 2) Lack of legality, 3) Lack of sharia financial literacy, so BMT members still do not understand the function of BMT. With the above conditions, the programs that we propose are: 1) introducing the first level BMT Islamic financial audit system, 2) Strengthening the understanding and application of Management Information Systems and Accounting Information Systems for BMT, for approximately eight months. This program is expected to be able to facilitate the business development of community service program partners and then be able to provide a multiplier effect for BMTs based on other newly built residential mosques..

Keywords: BMT Housing-Estate based Mosque, Banguntapan, Islamic Financial Audit

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Pengabdian

Kecamatan Banguntapan berada di sebelah Timur Laut Ibukota Kabupaten Bantul. Luas wilayah Kecamatan Banguntapan adalah 2.865,9537 Ha. dengan rincia tanah Sawah seluas 1.116 Ha; Tanah Tegal/Kering/Kebun seluas 1.528 Ha; Bangunan seluas 32 Ha; Tanah Lainnya seluas 172 Ha. Wilayah administrasi kecamatan Banguntapan meliputi 8 desa yaitu Desa Banguntapan, Desa Baturetno, Desa Singosaren, Desa Jagalan, Desa Tamanan, Desa Wirokerten, Desa Potorono, Desa Jambidan.



Sumber: Official website kecamatan Banguntapan (2017)

**Gambar 1. Kecamatan Banguntapan
 Di Timur dan Tenggara Kota Yogyakarta**

Kecamatan Banguntapan berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 15 Km. Bentangan wilayah di Kecamatan Banguntapan 100% berupa daerah yang datar sampai berombak. Letak nya secara geografis berada pada 7' 49' 44'' BT dan 110' 24' 30'' LS dengan posisi Timur Laut Ibukota Kabupaten Bantul.

Table. 1

Nama-Nama Perumahan di Kecamatan Banguntapan yang Tercatat di Kantor Kecamatan Banguntapan dan Google Maps

1.	Griya Abimana 01	Pondok Permai Banguntapan Residence	Perumahan Tamanan Nyaman	Perumahan Mutiara Asri
2.	Griya Wirokerten Sejahtera 2	Agatama Regency Banguntapan	Perum Pondok Permai Blok O	Perumahan Villa Cemara
3.	Bumi Citra Lestari BCL	Mukti Banguntapan Residence	Wiyoro The Residence	Perumahan Puri Tamanan Indah
4.	Bumi Mandiri Wirokerten BMW	Kirana Garden Residence at Banguntapan	PERUMAHAN BUMI RAYA INDAH	Perumahan Tiara Mas Blok O
5.	Perum Pemda Prop DIY	Villa Harmony Banguntapan	Perumahan Griya Wirokereten Indah	Perumahan BATAN
6.	Dalem Kotagede Asri	Perumahan Graha Banguntapan	Bale Indah Kotagede	Griya Pesona Banjar Tamanan
7.	Taman Hijau Residence	Perumahan Citra Pesona Mandiri	Rumah Dinas Kantor Hukum Dan HAM	Perumahan Pesona Griya Mutiara
8.	Puri Sakinah 2	Symphoni Banguntapan	Pesona Alam	Perumahan Pemda DIY
9.	Bale Indah Kotagede	Royal Mansion Banguntapan	Griya Romansa	Kalangan Townhouse
10.	Banguntapan Graha Citra	Pondok Permai	Puri Maheswari	Perumahan Asana Mutiara3
11.	Puri Potorono Asri	Perumahan Griya Wirokerten Indah	Purimas Tamansari 1	Perumahan MOJOSARI INDAH
12.	Jogja Town House 3	Perumahan Green Ambarukmo	Terasama Estate	Perumahan Alam Asri Giwangan
13.	Harmoni Graha Gemilang	Komp. Banguntapan Permai Dusun III Kalangan	Puri Wirokerten Asri	Rusunawa Progotamansari 3 Banguntapan
14.	Kampung Ambarukmo	Perumahan Sokowaten	Permata Garden Regency	Perumahan GKPN Gedongkuning
15.	Perhutani	Bumi Citra Lestari	BATURETNO PRATAMA	Perumahan Pringmayang Regency 2
16.	BLPP	Perumahan Griya Amartha	Griya Harmoni Pratama IV	Emerald Garden Regency
17.	Cipta Jogja Elegance	perumahan mutiara asri D7	Pondok Permai Giwangan	Perumahan Puri Sakinah 1
18.	Tiara Mas	Perumahan Tiara Mas 1	Perumahan Mojosari Baru	Perumahan Baturetno Permai
19.	Komplek TNI AU	Komplek Perumahan Janti Graha Yasa	Perumahan Griya Taman Karinda	Perumahan Pesona Giwangan
20.	Pondok Permai	Griya Gilang Asri	Cipta Jogja Elegance	PERUMAHAN BCA
21.	Mutiara Asri	Perum Gedongkuning	Perumahan Citra Pesona Mandiri	Perumahan Ironayan Beriman
22.	Janti Buana Asri	Ambarukmo Jaya Residence	Puri Taman Nirwana	Pesona Kotagede Singosaren
23.	Bumi Citra Asri	Banguntapan Residence Yuka	Fortuna Mansion Tamanan	
24.	Griya Gilang Asri	Perumahan Banguntapan Asri	Perumahan Kalangan Baru 2	
25.	Villa Cemara	Pondok Permai Wirosaban	Griya Tamanan Asri	

Sumber: Official website Kecamatan Banguntapan dan Google Maps (2017)

Berbatasan langsung dengan ibukota Yogyakarta menjadi nilai tambah ekonomi tersendiri bagi Banguntapan, karena berdekatan dengan pusat keramaian kota dan lokasi strategis pemerintahan

serta perdagangan. Sehingga, banyak developer perumahan membaca situasi ini dengan kemungkinan maraknya permintaan rumah yang tenang dipinggir kota. Sejak tahun 2009 hingga sekarang, perumahan-perumahan *cluster* dan semi *cluster* muncul mendekati 100 lebih perumahan dengan berbagai kelas dan tipe, dari kelas D (bawah) hingga kelas A (atas), dari tipe 36 hingga tipe 150 (penulis hanya berhasil mengumpulkan 97 perumahan dari website pemerintah dan google maps – tabel 1).

Marak pertumbuhan perumahan juga diimbangi dengan munculnya fasilitas disekitar dan didalam perumahan. Dimulai munculnya pusat kuliner, toko-toko, pusat jajanan, pusat kebugaran dan kolam renang, sekolah-sekolah usia dini, servis-servis, hingga supermarket. Kegiatan ekonomi ini muncul karena permintaan-permintaan susulan (*following demand*), seperti usaha servis *laundry*, kedai sayur dan sembako, kuliner, servis kecantikan dan kebugaran dan lain-lain, menjajari sentra industri yang memang menjadi andalan perekonomian kecamatan Banguntapan seperti: industri perak, mebel, kulit, emping, konveksi dan pertanian.

Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan RT, RW, Paguyuban, Arisan, Posyandu dan yang serupa, juga menimbulkan permintaan akan kebutuhan hadirnya lembaga simpan dan pinjam. Melihat fenomena ini, sebuah perumahan tema Islami mendirikan sebuah Koperasi dengan akad-akad Islami. Uji coba selama dua tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Sehingga, perumahan-perumahan lain tertarik untuk mengadakan koperasi syariah serupa. Hal ini didukung oleh munculnya masjid-masjid disetiap perumahan dan kondisi kecamatan Banguntapan yang memang terdiri lebih dari 92% muslim, sehingga *demand* terhadap kegiatan berbasis transaksi Islami juga meningkat.

Tabel 2: Jumlah Pendudukan Berdasarkan Agama Kecamatan Banguntapan

Desa /Kelurahan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kon	AK	Total
Baturetno	14.642	709	490	16	4	0	0	15.861
Banguntapan	32.535	1.933	2.937	431	21	0	0	37.857
Jagalan	2.995	28	23	0	0	0	0	3.046
Singosaren	3.736	9	4	4	1	0	0	3.754
Jambitan	9.719	59	62	0	0	0	0	9.840
Potorono	12.071	99	151	8	17	0	0	12.346
Tamanan	11.857	107	139	17	0	0	0	12.120
Wirokerten	13.112	138	67	5	4	0	0	13.326
Jumlah	100.667	3.082	3.873	481	47	0	0	108.150
Keterangan	AK: Aliaran Kepercayaan; Kon: Konghuchu							

Sumber: Official Website Kecamatan Banguntapan (2017)

1.2. Permasalahan Mitra

Saat ini sudah berdiri tiga BMT di tiga perumahan yang ada di table 1. Namun munculnya BMT tidak bisa serta merta diiringi dengan pengetahuan yang tinggi tentang keuangan syariah. Keputusan BMT masih dibawah keputusan penasehat syariah dan manajemen yang dipegang oleh satu orang. Rendahnya literasi keuangan syariah para pengurus dan masyarakat perumahan membuat rendahnya angka keanggotaan BMT dan kurangnya keterampilan dalam mengatur manajemen dan keuangan BMT. Sebagian besar anggota BMT adalah anggota yang benar-benar sadar dan mau mempelajari transaksi Islam. Untuk menjadi anggota asosiasi BMT saja, BMT harus merogoh kantong setidaknya Rp. 2,5jt. Selain itu, tingginya persyaratan pengajuan legalitas (memiliki modal sendiri minimal Rp. 15 juta) berakibat hingga saat ini tidak satupun dari BMT -yang pengurus jadikan mitra pengabdian- memiliki legalitas resmi dari Kementerian Koperasi atau dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketiadaan legalitas ini memiliki dampak lambatnya perkembangan BMT; rendahnya *trust* terhadap BMT; ketidakteraturan manajemen keuangan (seperti BMT belum bisa menggaji petugas hingga hari ini); dan BMT tidak bisa ekspansi keluar perumahan.

Ekspansi keluar perumahan adalah peluang yang sangat besar yang diharapkan semua mitra PKM ini. Tidak bisa ekspansi keluar berarti tidak bisa meraih peluang besar diluar perumahan seperti banyaknya subyek *micro-entrepreneurs* yang tumbuh seiring merebaknya perumahan di Kecamatan Banguntapan yang dapat dijadikan mitra bisnis oleh BMT; hilangnya kesempatan berpartisipasi didalam tawaran-tawaran program dari instansi keuangan mikro dan koperasi; hilangnya kesempatan turut meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal asli yang ternyata memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi (penduduk perumahan mayoritas adalah pendatang di Kecamatan Banguntapan). Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan ini adalah hilangnya sumber nafkah mereka setelah terjadi alih fungsi dua hektar lahan sawah setiap tahunnya untuk perumahan (Bantul, 2017).

**Tabel 3: Data Kemiskinan
 Kecamatan Banguntapan**

Desa	Jmlh Penduduk(Jiwa)	Jmlh KK Miskin(Jiwa)	Jmlh Penduduk Miskin(Jiwa)
Tamanan	12.354	846	2.714
Jagalan	3.270	201	597
Singosaren	4.887	207	674
Wirokerten	13.008	817	2.537
Jambidan	8.877	1.016	2.195
Potorono	12.299	995	3.274
Baturetno	16.787	995	3.182
Banguntapan	48.533	1.390	4.874
Jumlah	120.015	6.208	20.047

Sumber: Official Website Kecamatan Banguntapan (2017)

Kegiatan transaksi BMT yang berpindah-pindah tempat, karena belum memiliki kantor sendiri menjadi kendala terbesar dalam meningkatkan transaksi. BMT perumahan di kawasan kecamatan Banguntapan pada umumnya berbasis anggota arisan perumahan dan anggota pengajian masjid perumahan. Kegiatan yang mereka adakan menyesuaikan dengan intensitas pertemuan di dalam perumahan dan masjid masing-masing perumahan. Kegiatan BMT sendiri dikategorikan sebagai kegiatan bisnis yang notabene tidak boleh diadakan di dalam masjid. Permasalahan ini menyebabkan kegiatan transaksi BMT mengalami kendala. Apalagi, BMT yang baru berdiri belum bisa menyewa kantor sendiri.

Pemahaman akan literasi keuangan (*financial literacy*) menjadi hal yang penting demi menciptakan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera (Lusardi & Olivia, 2007). Tujuan pemahaman tersebut agar tidak salah dalam pengelolaan keuangan dan mampu memberikan dampak positif bagi roda perekonomian baik secara individu ataupun negara itu sendiri (Huston, 2010).

Berdasarkan Laporan Survei Nasional dan Inklusi Keuangan tahun 2016 yang dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tergolong *well literature* sebesar 29,66 persen. Sedangkan tingkat literasi keuangan syariah juga tergolong *well literature* sebesar 8,11 persen (OJK, 2016). Berdasarkan data di atas, angka indeks literasi keuangan tahun 2016 mengalami peningkatan dari survei tahun sebelumnya (2013: 21,84 persen). Meskipun indeks tersebut mengalami peningkatan pada angka tetapi masih mencerminkan rendahnya tingkat literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari angka 8,11 persen pada literasi keuangan syariah, dimana dapat disimpulkan bahwa kurang dari separuh jumlah penduduk Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan dengan baik pada produk dan jasa keuangan syariah.

1.3. Tujuan Pengabdian

Rendahnya pemahaman literasi keuangan syariah tentu akan memperlambat perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Literasi keuangan syariah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah bersama lembaga keuangan syariah perlu mengupayakan pemahaman melek keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia. Salah satu upaya peningkatan literasi

keuangan syariah adalah edukasi finansial (*financial education*). Menurut Mendari dan Kewal (2013) edukasi finansial adalah proses panjang yang memacu individu untuk memiliki rencana keuangan di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup yang mereka jalani.

Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah mengembangkan masyarakat (mitra dalam program ini adalah BMT yang baru saja berdiri dengan basis masjid perumahan, yaitu BMT Sakinah, BMT Al-Anbiya dan BMT Al-Huda) yang mandiri secara ekonomi dengan literasi tinggi terhadap transaksi syar'i; dan untuk menganalisa operasional kegiatan serta efektivitas system control internal BMT mereka telah sesuai dengan kehendak syar'i (*Shariah Compliance*).

II. METODE

Metode pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode partisipatoris. Penulis mengumpulkan data dengan metode PAR (*Participatory Action Research*) yaitu data didapat setelah melakukan diskusi dengan mitra pengabdian (bukan dengan melakukan wawancara) (Kindon, Pain, & Kesby, 2007). Partisipasi yang berkesinambungan dimulai dari analisa sosial (penyadaran tentang situasi dan kondisi), rencana aksi, aksi, evaluasi, refleksi (teoritik pengalaman) dan kemudian analisis sosial kembali begitu seterusnya mengikuti proses siklus lagi. Metode ini dipilih agar solusi yang diberikan adalah tepat guna, sesuai dengan kebutuhan BMT mitra. Dari hasil diskusi, didapat beberapa peta catatan yang dievaluasi sebagai kebutuhan mitra yaitu:

- a. Perlunya memperkenalkan system audit keuangan syariah BMT level pertama,
- b. Pemantapan pemahaman dan pelaksanaan akad sesuai Syariat Islam dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi untuk BMT
- c. Perlunya dukungan berupa software akuntansi BMT sebagai penunjang operasional BMT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Output dari program pengabdian ini nantinya adalah meningkatnya keterampilan petugas BMT dalam mengelola (*softskill* dan *hardskill*) dan anggotanya memiliki literasi yang tinggi terhadap BMT, sehingga anggota dapat mengoptimalkan keberadaan BMT dilingkungan mereka dan mensejahterakan kehidupan ekonomi mereka. Untuk itu dibutuhkan metode pendekatan partisipasi akan dilaksanakan Ceramah Umum, Kursus Singkat dan Tutorial dan Simulasi.

1. Sistem Audit Keuangan Syariah Level Pertama

Audit Syariah adalah proses penilaian dan penjaminan obyektif yang independen yang melibatkan perolehan dan evaluasi bukti yang cukup andal untuk menetapkan apakah kegiatan dan operasi lembaga keuangan Syariah sesuai dengan kriteria syariah yang ditetapkan dan merekomendasikan perbaikan dan peningkatannya. Proses ini dilakukan oleh lembaga independen atau bagian dari lembaga audit internal, untuk memeriksa dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap aturan Syariah, fatwa, instruksi dll yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Proses ini termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, laporan keuangan, laporan, dan lain-lain (Arwani, 2018).

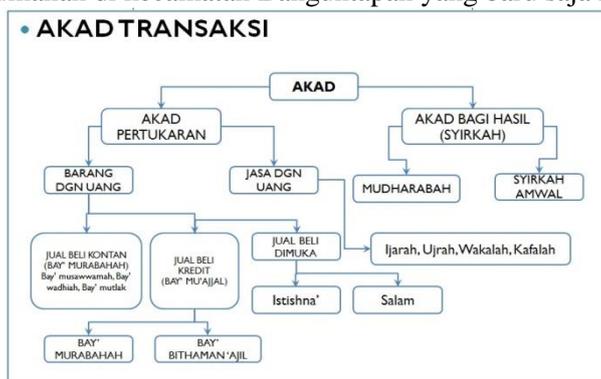
Tujuan Audit Syariah adalah untuk memberikan penilaian independen dan jaminan obyektif dan untuk memastikan sistem kontrol internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan Syariah. Kita membutuhkan Audit Syariah untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan integritas adalah hal yang sangat penting untuk bisnis apa pun dan terutama lebih mendesak dalam institusi keuangan Syariah. (Ghani, Ariffin, & Rahman, 2019) Kepercayaan dan integritas para pemangku kepentingan sehubungan dengan layanan keuangan Islam adalah persyaratan untuk menyampaikan kepada para pemangku kepentingan bahwa bisnis keuangan mereka dilakukan sesuai dengan keyakinan agama. (Kasim & Sanusi, 2013) Jika para pemangku kepentingan menyadari produk yang mereka miliki dalam portofolio mereka tidak sesuai dengan Syariah, ini akan secara serius merusak integritas dan kepercayaan diri dalam industri keuangan Islam secara keseluruhan.

Tahapan Audit Syariah yang harus dilalui adalah 1). Perencanaan: Memahami Bisnis BMT, identifikasi teknik dan ruang lingkup yang tepat, pemilihan sampel, mengembangkan rencana dan

program audit dan mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional. 2). Eksekusi: Kontrak pemeriksaan dan SOP, Pemeriksaan laporan, surat edaran, risalah rapat, Wawancara, Mengaudit perhitungan dan distribusi Zakat, Komputasi dan distribusi keuntungan audit, Mengamati operasi dan proses, Perhitungan dan perhitungan penalti audit. Menilai kecukupan sistem kontrol internal untuk kepatuhan Syariah. 3). Pelaporan: Melaporkan temuan kepatuhan Syariah dan ketidakpatuhan Syariah, Menilai tingkat ketidakpatuhan dan pengaruhnya terhadap BMT, Rekomendasikan tindakan perbaikan, perbaikan, dan perbaikan yang diperlukan oleh penanggung jawab, Sarankan timeline untuk perbaikan, Lacak dan pantau perkembangan perbaikan.

2. Pemantapan Pemahaman dan Pelaksanaan Akad Sesuai Syariat Islam

Pada program PKM ini khalayak sasaran (masyarakat produktif secara ekonomi yakni masyarakat di empat perumahan di kecamatan Banguntapan yang baru saja mendirikan BMT/



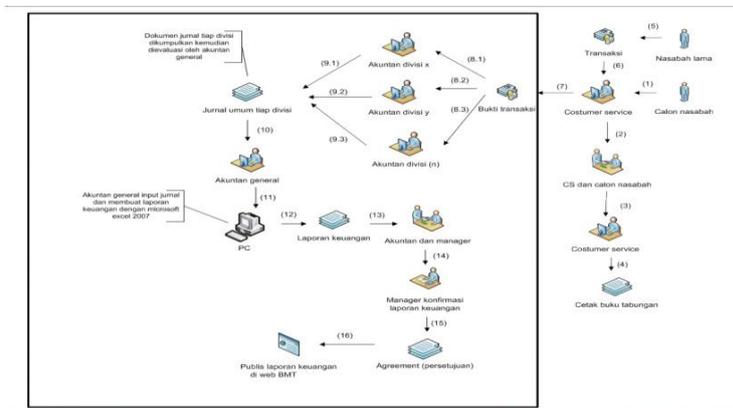
Gambar 2. Akad Transaksi Islami

usaha kecil) secara langsung memperoleh bantuan dari pengabdian masyarakat UMY berupa software akuntansi BMT sebagai penunjang operasional BMT. Disamping itu mitra memperoleh pelatihan transaksi menggunakan akad-akad Islam yang dapat dilaksanakan di BMT, dan prosedur masing-masing sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam fiqh muamalah. Prinsip ketidakbolehan utang dicampur dengan jual-beli, prinsip kepemilikan dan harta dalam Islam dan menghindari gharar, maisir dan riba adalah tuntunan yang harus ditaati. Proses Audit pelaksanaan akad-akad yang betul dan sesuai ketentuan Islam dan Dewan Syariah Nasional dimulai ditahap ini.

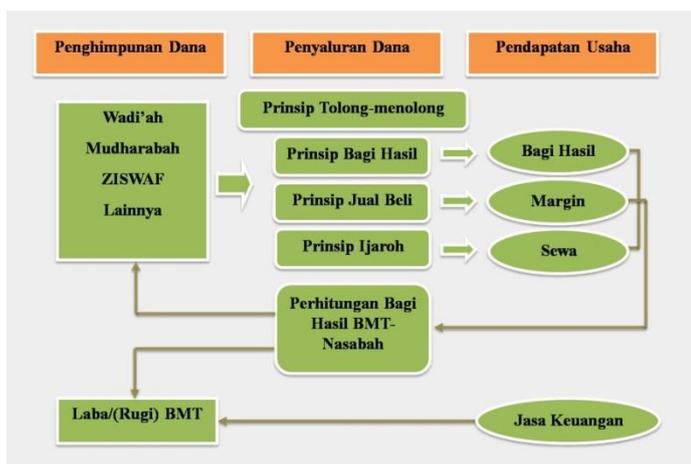
3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi Untuk BMT

Sistem informasi akuntansi ini dilaksanakan dalam bentuk workshop akuntansi yang bertahap dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya mitra dilatih untuk menggunakan software akuntansi BMT standard pada laptop BMT masing-masing dan menginput keuangan mereka. Selanjutnya adalah mengedukasi sistem informasi manajemen dengan model pelatihan dan pendekatan simulasi. Evaluasi manajemen BMT dilakukan setelah materi diberikan.

Peran Audit Syariah institusi keuangan Syariah membutuhkan sistem dan kontrol yang memadai yang memastikan kepatuhan terhadap Syariah melalui proses penjaminan independen atas Audit Syariah. Audit Syariah akan menyediakan mekanisme bagi regulator untuk memantau, mengendalikan, dan mengambil tindakan jika lembaga keuangan Syariah tidak memenuhi persyaratan Syariah. Institusi keuangan Syariah diklaim untuk mempraktikkan keuangan etis dan harus mematuhi Syariah dalam semua kegiatan dan operasi bisnis mereka.



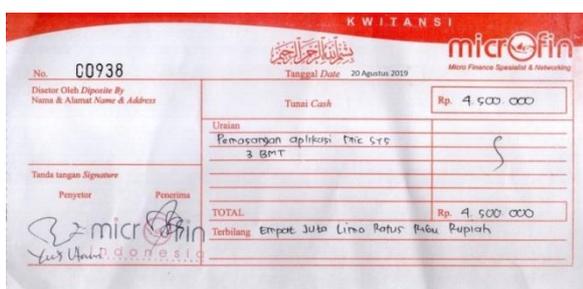
Gambar 3.
Sistem Informasi Akuntansi untuk BMT



Gambar 4.
Sistem Informasi Manajemen

4. Dukungan Penunjang Operasional: Software Akuntansi BMT

Penulis bekerja sama dengan konsultan IT penyedia software BMT dasar untuk keperluan pengabdian ini. Instalasi software diberikan sekaligus dengan pelatihan penggunaan dasar Software. Selanjutnya pelaksanaan akan dievaluasi pada pengabdian masyarakat berikutnya, sebab pelaksanaan operasi IT ini memerlukan skill yang terarah dan dana yang tidak sedikit.



Gambar 5.
Bukti Pembelian Software Akuntansi Dasar BMT

IV. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengembangkan dan menguatkan BMT masyarakat perumahan di Banguntapan yang mandiri secara ekonomi dengan literasi tinggi terhadap transaksi syar'i dan menguatkan kelembagaan mereka melalui wakaf uang/tunai. Wakaf Tunai/Wakaf uang adalah fasilitas fiskal abadi dari keuangan Islam yang dapat menghidupi sektor moneter, terutama institusi keuangan mikro. Untuk itu, pengabdian telah melaksanakan Sosialisasi aplikasi Akad Transaksi yang dilegalkan Dewan Syariah Nasional, memantapkan pemahaman dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi untuk BMT, serta menyumbangkan sarana pendukung untuk penyelenggaraan BMT berupa suntikan pengadaan laptop dan buku tabungan serta software aplikasi system informasi akuntansi BMT dengan wakaf.

Tahapan Audit Syariah yang dilakukan adalah 1). Perencanaan: Memahami Bisnis BMT, identifikasi teknik dan ruang lingkup yang tepat, pemilihan sampel, mengembangkan rencana dan program audit dan mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional. 2). Eksekusi: Pemeriksaan Kontrak dan SOP, Pemeriksaan laporan, surat edaran, risalah rapat, Wawancara, Mengaudit perhitungan dan distribusi Zakat, Komputasi dan distribusi keuntungan audit, Mengamati operasi dan proses, Perhitungan dan perhitungan penalti audit. Menilai kecukupan sistem kontrol internal untuk kepatuhan Syariah. 3). Pelaporan: Melaporkan temuan kepatuhan Syariah dan ketidakpatuhan Syariah, Menilai tingkat ketidakpatuhan dan pengaruhnya terhadap BMT, Rekomendasikan tindakan perbaikan, perbaikan, dan perbaikan yang diperlukan oleh penanggung jawab, Sarankan timeline untuk perbaikan, Lacak dan pantau perkembangan perbaikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arwani, A. (2018, September). Issues and Challenges of Shariah Auditing in Islamic Financial Institution and Corporate Governance Compliance. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 18(2), 169-186.
- Arwani, A. (2018, September). Issues and Challenges of Shariah Auditing in Islamic Financial Institution and Corporate Governance Compliance. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, 18(2), 169-186.
- Bantul, P. (2017). *Profil Kecamatan Banguntapan*. Retrieved Januari 18, 2018, from Kecamatan Banguntapan: kec-banguntapan.bantulkab.go.id/hal/profil
- Ghani, N. L., Ariffin, N. M., & Rahman, A. R. (2019). The Measurement of Effective Internal Shariah Audit Function in Islamic Financial Institution. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 27(No.1), 141-165.
- Huston, S. (2010). Measuring Financial Literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, 4(2).
- Kasim, N., & Sanusi, Z. M. (2013). Emerging Issues for Auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical Evidence from Malaysia. *IOSR Journal of Business and Management*, 8(5), 10-17.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods*. New York: Routledge.
- Lusardi, A., & Olivia, S. (2007). Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education Program.
- Mendari, A. S. (2013, October). Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa STIE Musi ., *Jurnal Economica*, 9 (2), 2.
- OJK. (2016). *Laporan Publikasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Retrieved Januari 12, 2016, from Otoritas Jasa Keuangan: www.sikapuangmu.ojk.go.id.
- OJK. (2016, Januari). *Laporan Publikasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2016*. Retrieved Januari 12, 2016, from Otoritas Jasa Keuangan: www.sikapuangmu.ojk.go.id